

PARADIGMA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Drs. Ibrahim Musa, M.A., Ph.D

*Staf Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Kementerian Pendidikan Nasional*

Pada hakekatnya dasar dan tujuan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pendidikan nasional adalah jembatan emas bagi pencapaian tujuan nasional itu sendiri. Tanpa pendidikan, mustahil tujuan bangsa Negara Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional perlu dilandasi oleh kajian teori tentang paradigma pendidikan nasional yang mencakup hakekat pendidikan itu sendiri, dasar dan tujuannya, visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan, prinsip penyelenggaraan, standar mutu hasil dan proses operasional, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, program dan kegiatan belajar mengajar (KBM), serta hasil yang diharapkan dari pendidikan.

1. HAKEKAT PENDIDIKAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu mewujudkan kemanusiaannya, sehingga makna pendidikan identik dengan makna kemanusiaan itu sendiri. Jika pendidikan ditelantarkan maka kehidupan manusia juga akan terlantar. Pendidikan diperlukan untuk menghidupkan hati nurani melalui pendidikan akhlak berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Namun, pada sisi lainnya manusia juga memerlukan pendidikan kecakapan hidup yang menumbuhkembangkan kemampuan keindraan manusia sebagai instrument fisik yang diperkukan untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi. Sejatinya pendidikan yang autentik merupakan proses dan hasil pembudayaan dan pemberdayaan hati nurani agar menjadi rajawali dengan karakter kepemimpinan yang jujur, amanah, cerdas, dan mendidik. Hati nurani harus mampu menjadi rajawali yang mengendalikan hawa nafsu akal dan indriawi agar manusia selamat dalam membangun kehidupan di dunia dan di akhirat.

Konstruksi paradigma pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan hati nurani serta akal dan indra manusia yang menghasilkan ilmu pengetahuan bersumber dari pemahaman terhadap hakikat keyakinan dan kebenaran tentang alam semesta sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk membangun amal dan ibadah kepada Tuhan-YME dapat dirangkumkan dalam gambar berikut.



Gambar 1: Paradigma Pendidikan, Hati Nurani, Hawa Nafsu, Akal dan Indra, Amal dan Ibadah, Keimanan dan Ketakwaan, serta sumbernya Keyakinan (*Beliefs*), Kebenaran (*Truths*), dan Ilmu Pengetahuan.

2. DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Setiap bangsa dan Negara, sesuai dengan cita-cata berbangsa dan bernegara, mempunyai tujuan yang unik akan dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. yaitu: [1] sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya), tajam pikiran; [2] sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). Mencerdaskan berarti mengusahakan dan sebagainya supaya sempurna akal budinya.

Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir dari setiap lembaga pendidikan dalam kerangka mewujudkan cita-cita konstitusional bangsa dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, produktif, mandiri, demokratis, dan berkepribadian Pancasila. Secara pedagogis, tujuan pendidikan nasional tersebut akan dicapai dengan memaknai pendidikan sebagai proses dan hasil pembudayaan dan pemberdayaan norma-norma Pancasila secara konsisten.

3. VISI DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL

Visi pendidikan nasional merupakan gambaran tentang wujud sistem pendidikan nasional yang ideal. Bangsa Indonesia yang multi etnis dan multi budaya yang tersebar dalam ribuan pulau (kepulauan) memerlukan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang mampu melayani kebutuhan akan pendidikan sebagai konsumsi dan investasi

sumber daya manusia secara merata, bermutu, dan efisien dalam lingkungan kehidupan yang berubah dengan sangat cepat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya yang mengglobal.

Ki Hajar Dewantara melihat visi pendidikan nasional harus bersemangat keluhuran budi, mementingkan nilai budaya, pembentukan jiwa seutuhnya berbasis kekeluargaan. Sedangkan dalam konteks pendidikan sebagai organisasi, visi pendidikan merupakan organisasi sosial yang terbuka, yang sangat tergantung pada kebutuhan dunia lingkungannya, dan merupakan organisasi belajar (*learning organization*). Sebagai organisasi belajar, visi sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mencakup organisasi pendidikan pada tingkat nasional (organisasi makro), tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara regional (organisasi meso), dan pada tingkat satuan pendidikan (organisasi mikro).

Misi pendidikan nasional adalah kebijakan nasional yang diperlukan untuk mewujudkan visi pendidikan nasional. Dari perspektif Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Misi pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan nasional dirinci menjadi misi jangka panjang dan jangka pendek, yaitu pentahapan dalam mewujudkan cita-cita membangun kehidupan bangsa yang cerdas melalui:

- 1) meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang mengutamakan pada pembentukan akhlak mulia dan kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan;
- 2) menyelenggarakan pendidikan sebagai proses dan hasil pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang bertumpu pada potensi sosial-budaya, ekonomi, dan geografis dalam rangka mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa berbasis Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
- 3) meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- 4) melaksanakan pengelolaan pendidikan sebagai organisasi belajar, dan sistem pendanaan berbasis biaya satuan pendidikan untuk mengoptimalkan mutu hasil dan proses pendidikan secara nasional; dan
- 5) memberdayakan peran serta masyarakat sebagai bentuk demokratisasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

4. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan perlu disusun strategi pembangunan secara nasional yaitu langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Strategi pembangunan pendidikan nasional mencakup program-program strategis yang harus dilaksanakan oleh semua komponen sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Program strategis pembangunan pendidikan nasional diturunkan kedalam rencana strategis (Renstra) program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (makro), pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota (meso) dan tingkat satuan pendidikan (mikro) pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Realisasi dan hasil pelaksanaan rencana strategis program pembangunan pendidikan nasional merupakan acuan bagi penilaian keberhasilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola program pembangunan pendidikan nasional dalam mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan bangsa yang diukur melalui kinerja semua unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional, unit pengelola pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan.

Program pembangunan strategis pendidikan nasional diantaranya mencakup:

- 1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- 2) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3) proses pembelajaran yang mendidik, dialogis, dan inovatif berbasis kekeluargaan yaitu dengan memberikan keteladanan, bantuan, dan dorongan (memotivasi) peserta didik;
- 4) peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan berasrama, penugasan berbasis ikatan dinas, serta memberikan pengalaman praktek di laboratorium pendidikan pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditentukan oleh Pemerintah;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendidik, nyaman, aman serta kondusif bagi pembentukan karakter kepribadian Pancasila dan pengembangan kompetensi vokasional dan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 6) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip kecukupan, pemerataan, dan berkeadilan berdasarkan standar biaya satuan per peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- 7) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata terutama pemenuhan kebutuhan akan pendidikan pada daerah di perbatasan, kepulauan terpencil, pedesaan tertinggal, dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- 8) pelaksanaan wajib belajar hingga pendidikan menengah yang dibiayai dari pajak pendidikan;
- 9) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan sebagai perwujudan dari demokratisasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- 10) pengendalian mutu pendidikan melalui evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan pengawasan pendidikan yang memberdayakan peserta didik dan satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 11) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendasari pembaruan sistem pendidikan nasional.
- 12) penyelenggaraan pendidikan sebagai pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- 13) pemberdayaan peranserta masyarakat dalam berpartisipasi, mendukung, mengevaluasi, dan pengawasan terhadap pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan dan pengelolan pendidikan nasional.

5. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Prinsip penyelenggaraan pendidikan diwujudkan sebagai upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional yang kondusif bagi pembentukan manusia Indonesia yang Pancasila. Menurut Ki Hadjar Dewantara, dalam rangka menyiapkan bangsa yang merdeka

perlu dibangun sistem pendidikan berbasis kekeluargaan yaitu *ing karso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani*.

Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang cerdas sesuai nilai-nilai Pancasila, pendidikan nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dalam konteks pendidikan sebagai pranata sosial, organisasi belajar, dan organisasi sosial terbuka.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan layanan pendidikan yang sistemik, terbuka, dan multimakna pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kehidupan global.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik melalui pengajaran, pelatihan, pendisiplinan, dan pembiasaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan mental peserta didik.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis kekeluargaan.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan berinovasi bagi segenap warga masyarakat dalam kerangka pembangunan masyarakat belajar.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan sebagai organisasi sosial terbuka pada tingkat satuan pendidikan (mikro), kabupaten/kota dan provinsi (meso), dan nasional (makro).
- 7) Pendidikan diselenggarakan berbasis otonomi pada satuan pendidikan, sedangkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat membantu dan memfasilitasi satuan pendidikan agar mampu memberikan layanan pendidikan yang merata, relevan, bermutu, dan efisien, serta menjadi motor pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

6. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Untuk menjamin mutu, sistem pendidikan nasional harus dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan ukuran input, proses, dan hasil pendidikan yang terstandar sebagai acuan indikator pencapaian mutu layanan pendidikan. Standar tersebut mencakup standar mutu hasil (standar produk), dan standar mutu proses (standar operasional). Standar produk pendidikan nasional adalah tingkat mutu hasil pendidikan yaitu kecakapan hidup (*life skills*) berupa karakter kepribadian Pancasila dan kompetensi vokasional dan professional dalam menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan/atau orang lain.

Standar operasional adalah input dan proses yang harus dipenuhi agar satuan pendidikan dapat menghasilkan layanan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan sesuai standar produk pendidikan. Standar operasional pendidikan mencakup standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan,

dan standar penilaian hasil pendidikan.

7. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN.

Sistem pendidikan nasional didukung oleh dua komponen inti yaitu penyelenggara dan pengelola pendidikan. Penyelenggara pendidikan adalah satuan pendidikan yang didukung oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan staf administrasi yang memberikan layanan pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Penyelenggara pendidikan didominasi oleh pendidik yang perlu memiliki ilmu pengetahuan teknis kependidikan dan keterampilan menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pembelajaran, pelatihan, pendisiplinan, dan pembudayaan peserta didik secara konstruktif, inovatif, futuristik, dan humanistik. Sedangkan pengelola pendidikan didominasi oleh tenaga kependidikan yang dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan tentang penyusunan dan analisis kebijakan publik, administrasi dan manajemen pendidikan, sosiologi pendidikan, ekonomi pendidikan, teknologi pendidikan dan penelitian dan pengembangan inovasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal diselenggarakan secara berjenjang mencakup pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan pendidikan pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi tanggungjawab Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam konteks otonomi pemerintahan daerah. Pengelolaan pendidikan pada tingkat mikro menjadi tanggungjawab kepala satuan pendidikan.

Dalam kerangka demokratisasi dan otonomi, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan perlu melibatkan peranserta masyarakat yaitu orang tua peserta didik dan anggota masyarakat pengguna hasil pendidikan. Peranserta masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat (swasta) dimana pemerintah berkewajiban memfasilitasi serta membantu pembiayaan berupa subsidi terutama dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Peranserta langsung masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberian hak konstitusional kepada Dewan Pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan pendidikan adalah aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Program dan kegiatan pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka, di mana peserta didik dapat mengikuti pendidikan sesuai waktu dan kesempatan yang tersedia, melalui pendidikan tatap muka dan/atau sistem pembelajaran jarak jauh. Program dan kegiatan dituangkan kedalam bentuk kurikulum dan matapelajaran yang disusun untuk setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak fokus pada penyiapan dan merupakan transisi anak didik dari kehidupan di lingkungan keluarga ke dalam lingkungan dunia pendidikan formal di sekolah. Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar diarahkan pada penyiapan peserta didik untuk membangun karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan menguasai keterampilan hidup tingkat dasar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) pendukung kecakapan akademik dan vokasional

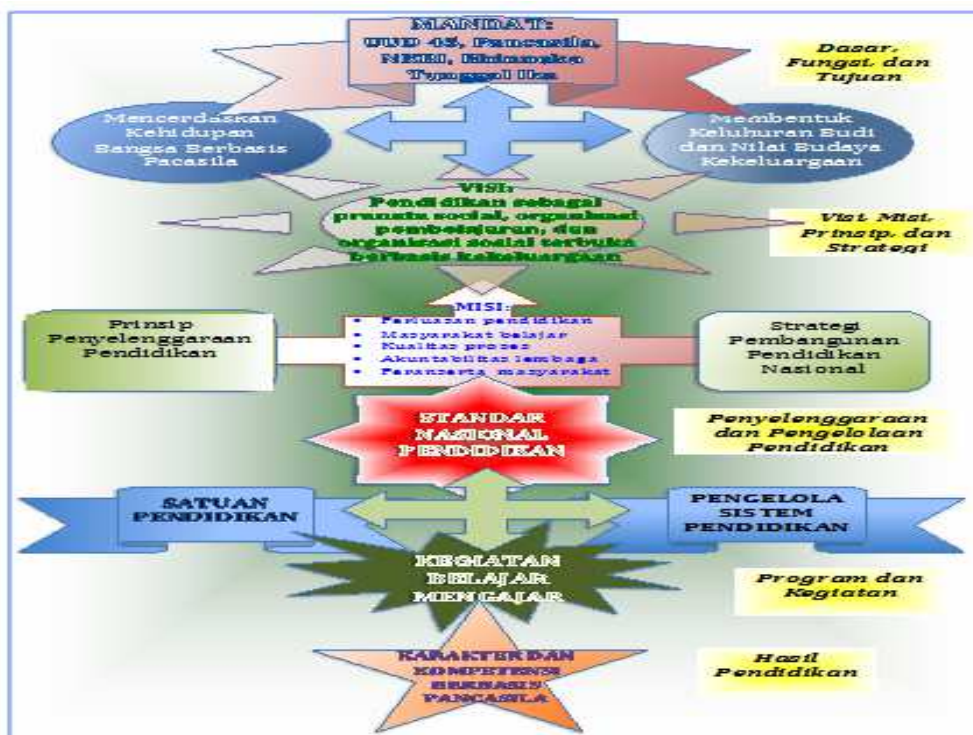
anak-anak pada usia 7-14 tahun di lingkungan keluarganya dan masyarakat wilayah kabupaten/kota dan provinsi.

Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah diarahkan pada penyiapan peserta didik untuk membangun karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) pendukung kecakapan akademik dan vokasional untuk menunjang kehidupan remaja pada usia 15-18 tahun di lingkungan masyarakat wilayah provinsi dan nasional. Program dan kegiatan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi diarahkan pada penyiapan peserta didik untuk membangun karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) pendukung kecakapan akademik dan profesional untuk pemuda usia 19-28 tahun dalam lingkungan hidup di wilayah nasional dan internasional.

9. HASIL PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan kompetensi, baik berupa karakter kepribadian maupun kecakapan hidup vokasional dan profesional. Proses produksinya melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, pendisiplinan, dan pemberdayaan sehingga pendidikan dikatakan sebagai proses pembudayaan, baik pembentukan budaya baru maupun transformasi budaya dari generasi sebelumnya. Dilihat dari produk atau hasil pendidikan, perlu dirancang spesifikasi mutu hasil pendidikan (“spesifikasi produk”) sesuai dengan keinginan konsumen dan pemangku kepentingan pendidikan yang diamankan oleh UUD-NRI 1945.

Paradigma sistem pendidikan nasional yang menjadi pedoman penyusunan UU Sisdiknas dapat dirangkum seperti dalam gambar berikut.



Gambar 2 : Paradigma Sistem Pendidikan Nasional

Daftar Pustaka:

- Charles A. Gianfrani, Joseph J. Triakals, and John F (Jack) West, *ISO 9001-2008 Explained, Third Edition*, American Society for Quality (ASQ), Milwaukee-Wiskonsin, 2009.
- David Hoyle, *ISO 9000: Quality Systems Handbook, Sixth Edition*, Elsevier, Burlington, MA. 2009.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. Macmillan Publishing C. Inc., New York. 1966.
----- *How We Think*. D.C. Heath & Co. Boston. 1910.
----- *Experience and Nature*. Dover Publication, Inc. New York. 1958.
----- *Experience and Education*. Simon & Schuster. New York. 1997.
- Edward Sallis. *Total Quality Management in Education, Thirde Edition*. Kogan Page Ltd. 1993
- Garry D. Brower and Peter deLeon, *The Foundations of Policy Analysis*, The DORSE Press, Chicgo, 1983
- Harold Koontz and Cyril O'Donnell, *Principles of Management: An Analysis of Management Functions*, McGraw-Hill Book Company, NY, 1964.
- Henry Mintzberg, *Sructure in Fives: Designing Effective Organization*, Prentice Hall, NJ, 1993
- J.M. Juran. *Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services*. The Free Press. New York, 1992.
- James, William. *Pragmatism and Four Essays from The Meaning of Truth*, Meridian Books, The World Publishing Co. New York. 1955.
- Jan Aart Scholte, *Globalization – A Critical Introduction* , Palgrave, 2000,
- Karya Ki Hadjar Dewantara*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1977.
- Leanna Stiefel, Amy Allen Schwartz, and Ross H. Rubenstein (1999), *Measuring School Efficiency Using School-Level Data*, in Margaret E. Goertz and Allan Oden (Ed.), *School-Based Financing*, Corwin Press, Inc., A Sage Publication, Thousqan Oaks, California, 1999,
- Lewin, K.; Lippitt, R.; White, R.K. (1939). "*Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates*". *Journal of Social Psychology* 10: 271–301.

- Lewy, Arie (Editor). *Handbook of Curriculum Development*. Unesco Press. Paris. 1977.
Magazin.com www.joelconsulting.com/megatrends.htm
- Marmar Mukhopadhyay, *Total Quality Mangement in Education: Second Edition*, SAGE Publication, New Delhi, 2005
- McMahon, W.W. and Geske, T.B. (Ed.), *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequality*, University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 1982.
- Musa, Ibrahim. *Pendanaan Perguruan Tinggi Sistem Pinjaman Bersubsidi Jangka Panjang*. Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, April 2011.
- Peter M. Sange, *The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization*. Current Doursday, New York, 2006.
- Philip B. Crosby, *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain*, A Mento Book, 1980.
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. Harcourt. Brace & Word, Inc., New York, 1962.
- Tanner, Daniel., and Tanner, N. Laural. *Curriculum Development, Theory and Practice*. Macmillan Publishing Co., Inc. New York, 1980
- Thomas J. Sergiovanni, Paul Kelleher, Martha M. McCarthy, Frances C. Fowler. *Educational Governance and Administration. Sixth Edition*. Pearson, NY. 2009.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. The University of Chicago Press, Chicago. 1949
- Renstra Depdiknas tahun 2010-2014*, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Saylor, J. Galen, and Alexander, William M. *Planning Curriculum for Schools*. Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York. 1974.
- Soekarno, *Menjadi Goeroe di Masa Kebangoenan, dalam Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, 1963
- The Holmes Group, *Tomorrow's Schools, East Lansing*: The Holmes Group Inc, 1999.
- Turney, C, *Innovation in Teacher Education*, Sidney University Press, Sidney, 1977.